



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

- Nama : HIZIR
- Jabatan : DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
- NHK : 277424

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 929.821.068

- Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/128 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 771.750.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 484 m2/75 m2 di ACEH BESAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 130.235.568
- Tanah Seluas 4552 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 27.835.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 241.423.785

- LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.269.675
- LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 754.110
- MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS 1.5L PLUS 4X2 A/ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 239.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 216.227.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 232.387.690

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.619.859.543

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.619.859.543

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.